

## **PENGUKURAN *E-READINESS* PROVINSI GORONTALO DALAM PENERAPAN *SMART GOVERNMENT***

Firto Nento<sup>1</sup>, Lukito Edi Nugroho<sup>2</sup>, Selo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Universitas Gadjah Mada*

*firto.nento@mail.ugm.ac.id*

### **ABSTRAK**

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah berkembang ke arah konvergensi digital. Situasi ini telah membuka peluang besar terhadap integrasi vertikal dan horisontal, baik di dunia industri maupun pemerintahan. Sementara itu pengembangan *smart government* mulai dikembangkan dengan merasionalkan ketersediaan teknologi tersebut dalam menyediakan layanan prioritas pemerintah. Pengukuran *e-readiness* merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan *smart government*. Pesatnya kemajuan TIK dan kurangnya kapasitas di tingkat daerah menjadi alasan mengapa pengukuran *e-readiness* tersebut perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal itu, penelitian ini akan melakukan pengukuran *e-readiness* Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kaitannya dengan penerapan *smart government*. Pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan sosio teknis dimana faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional merupakan tiga faktor utama yang perlu diukur dalam *e-readiness* ini. Alat pengukuran *e-readiness* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah alat pengukuran yang dikembangkan oleh Musa dalam pengukuran *e-readiness* di Irak pada tingkat pemerintah daerah. Adapun data yang dikelola dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan kualitatif diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada empat kelompok responden di daerah Provinsi Gorontalo. Kelompok responden tersebut adalah 1. Kelompok administrator *e-government*, 2. Kelompok pegawai pemerintah, 3. Kelompok masyarakat umum, dan 4. Kelompok bisnis penyedia layanan. Hasil pengukuran *e-readiness* khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berada pada angka 74,20 pada *grade* "B" dengan interpretasi "Tinggi". Sedangkan untuk nilai *e-readiness* rata-rata yang menyatakan kesiapan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah sebesar 58,68 pada *grade* "C" dengan interpretasi tingkat kesiapan "Sedang".

**Kata kunci** : *e-readiness, smart government, smart city, Gorontalo*

### **ABSTRACT**

*The transformation of information and communication technology (ICT) nowadays is evolving toward digital convergence. This situation has opened up great opportunities for vertical and horizontal integration, both in industry and government. Meanwhile, the development of smart government begin to rationalize the availability of such technology in providing government services. Measuring e-readiness is one of the important things to do in order to achieve smart government's successfulness. The rapid development of ICTs and the lack of capacity at the local level is the reason why the measurement of e-readiness needs to be done. In this regard, this study will measure the e-readiness of the Gorontalo Provincial Government in relation to the implementation of smart government. This measurement is done by a socio-technical approach where technological factors, human factors and institutional factors are the three main factors that need to measure in this study. The e-readiness assessment tool used in this study is a tool developed by Musa when measuring e-readiness at the local government of Iraq. The data used in this study is quantitatively and qualitatively obtained from the questionnaire distributed to four groups of respondents in the province of Gorontalo. They were 1. The government, 2. The employee 3. The citizen, and 4. The business groups of service providers. The results of the measurements are 74.20 in "B" grade or interpreted as "High" for Gorontalo Provincial Government itself. As for the average e-readiness value which states the readiness*

of Gorontalo Province as a whole is 58.68 in grade "C" or interpreted as at "Medium" of readiness level.

**Keywords:** *e-readiness, smart government, smart city, Gorontalo*

## PENDAHULUAN

Implementasi aplikasi TIK di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti dalam domain politik, sosial, ekonomi, budaya, ideologi, politik, dan pertahanan keamanan telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat penerapan TIK yang dirasakan oleh beragam sektor industri seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur, perbankan, keuangan, transportasi, retail dan distribusi, pariwisata, serta jasa-jasa lainnya menunjukkan bagaimana teknologi ini akan senantiasa berkembang dan diadopsi oleh seluruh individu dan komunitas. Menurut Global Internet Report 2016 [1] yang dikutip dari ITU (International Telecommunication Union), bahwa kehadiran website dewasa ini telah mendekati angka 3,5 milyar yang pada tahun 2000 baru mencapai angka 10 juta [2] website di dunia.

Smart government adalah implementasi serangkaian proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga memungkinkan kelancaran informasi lintas program dan sektor pemerintah, dengan tujuan agar pemerintah menjadi lebih tanggap dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat [1].

Konsep *smart government* mengentengahkan sebuah tatanan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan umum melalui pemanfaatan TIK secara efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah seringkali mengusung wacana penerapan *smart government* ini pada berbagai forum di internal pemerintah daerah.

Melihat fenomena penerapan *e-government* yang umumnya terjadi kita menyadari bahwa suksesnya penerapan smart government tersebut tidak selesai pada pemenuhan infrastruktur TIK semata. Tidak sedikit inisiatif *e-government* yang berakhir dengan kegagalan [3] karena keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut hanya didasarkan pada trend yang sedang berkembang [4]. Tidak jarang ditemui bahwa penerapan konsep *e-government* tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Menurut

Kumorotomo [5] kegagalan tersebut terjadi karenan adanya perbedaan persepsi mengenai definisi *e-government* bahkan di tingkat pakar administrasi negara. Di Indonesia, pemaknaan *e-government* sering merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Padahal, dalam khazanah internasional, *e-government* lebih merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi internet [6].

## METODE

Musa [7] dalam risetnya tentang asesmen *e-readiness* untuk regional pemerintah daerah di Iraq menyatakan bahwa pengembangan *e-government* menyimpan potensi yang sangat besar. Potensi ini harus mampu membawa semangat bagi pemerintah daerah untuk mentransformasikannya menjadi sebuah program penting yang mendukung reformasi administrasi, sosial, dan ekonomi, yang kesemuanya itu berorientasi pada memfasilitasi faktor-faktor keberhasilan *e-government* itu sendiri, dan terlebih lagi untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diambil masyarakat dari transformasi *e-government* yang dilakukan.

Dalam upaya menghindari atau setidaknya meminimalisir kegagalan tersebut, penerapan *e-government* harus dimulai dengan membentuk kesiapan diri suatu organisasi, yang mana tingkat kesiapan tersebut ditunjukkan dari hasil pengukuran *e-readiness*. Selanjutnya, efektifitas hasil pengukuran *e-readiness* ditentukan oleh seberapa efektif suatu organisasi mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada dilingkungannya, menetapkan faktor dan indikator *e-readiness* yang relevan. Untuk itu, mempelajari situasi yang berkembang di tingkat nasional dan regional menjadi faktor penting dalam penetapan indikator dan faktor-faktor terkait [8].

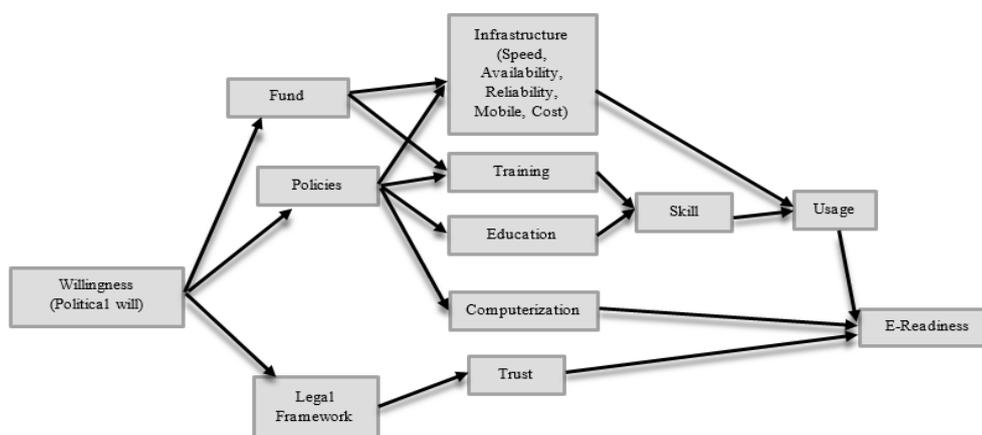
Penetapan indikator dan faktor-faktor yang relevan akan mengarahkan kepada adaptasi sebuah model atau *tool e-readiness* yang sesuai untuk konteks atau regional daerah tertentu. Musa [7] mengatakan bahwa

tool tersebut harus sederhana, mudah digunakan, dan konsisten dengan realitas lingkungan pemerintahan tertentu. *Tool* ini harus mengukur beberapa aspek yang dipandang penting bagi suatu daerah dimana *e-government* tersebut akan diterapkan, yang mana kondisi yang dihadapi oleh setiap daerah berbeda satu sama lain.

Lebih lanjut Musa [7] menyatakan argumen yang menyatakan bahwa sebuah *tool* dapat diadopsi karena beberapa alasan. Sebagian besar *assessment tool* yang ada menggunakan daftar indikator yang panjang, yang beberapa mungkin tidak sesuai untuk kota ukuran populasi dan daerah yang relatif kecil, dan tingkat kegiatan ekonomi yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena riset-riset *e-readiness* pada umumnya berfokus pada tingkat negara tertentu sehingga kurang tepat untuk diaplikasikan di tingkat lokal. Selain itu, *assessment tool* yang berbeda sangat mungkin menggunakan bobot yang berbeda untuk indikator yang sama, sehingga hal ini sering menciptakan kebingungan dan menambah kompleksitas bagi pemerintah lokal dalam memilih

*assessment tool* yang tepat. Terkait dengan hal tersebut, Musa menawarkan sebuah *tool* pengukuran *e-readiness* yang dibangun melalui pendekatan sosio teknis dengan mempertajam lingkup kajian yang lebih dalam di tingkat regional. Hal ini menjadi salah satu hal yang membedakan *tool* tersebut dengan lainnya yang kajiannya umumnya berdasarkan perspektif makro di tingkat nasional atau negara tertentu dan belum mempertimbangkan faktor-faktor penting di tingkat regional.

*Tool* tersebut mengukur aspek-aspek tertentu dari masyarakat dan beberapa fitur layanan dan teknologi yang diperlukan dalam transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sistem konvensional ke arah digital (*e-government*). Pada dasarnya *tool* ini dimaksudkan untuk memberikan indikasi terbaik tentang variabel yang mempengaruhi *e-government*, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan apa saja yang patut menjadi prioritas dan perbaikan apa yang krusial harus dilakukan dalam meningkatkan *e-readiness* sebuah organisasi.



Gambar 1. Model hubungan variable e-readiness (menurut Musa, 2010)

Berdasarkan analisis atas model tersebut, Musa menetapkan sejumlah indikator yang diusulkan sebagai instrumen pengukuran *e-readiness* di tingkat

pemerintah daerah di Irak, dan dapat dikembangkan untuk pemerintah daerah negara-negara berkembang lainnya.

Tabel 1. Daftar indikator E-Readiness (Menurut Musa 2010)

	Infrastructure	Human Resources (Users and Government employees)	Government & Management
1	Speed of Internet	Government Trust	Computerization
2	Availability	Skills	Willingness (Political will)
3	Cost of Internet	Education	Fund
4	Reliability	Usage	Policies
5	Mobile internet	Training	Legal Framework

Dalam kaitannya dengan konteks *smart government*, peneliti memperhatikan konsep smart city oleh Nam dan Pardo [9], dan merujuk pada *smart city framework* menurut Boyd Cohen [10], [11] dalam hal pemilihan indikator *e-readiness*, khususnya dalam aspek yang terkait dengan *smart government*, dan belum terakomodir dalam framework Musa ini. Oleh sebab itu,

Indikator-indikator *smart government* menurut Cohen diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran *e-readiness* dalam *tool* yang diusulkan Musa. Indikator-indikator tersebut dipetakan kedalam tiga faktor penting yang mempengaruhi *e-readiness*, yaitu; faktor teknologi, faktor institusional dan faktor manusia, khususnya di tingkat lokal (pemerintahan daerah).

Tabel 2. Faktor-faktor E-readiness

Faktor Teknologi	Faktor Manusia	Faktor Institusional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan (availability)</li> <li>• Keandalan (Reliability)</li> <li>• Penetrasi internet (ketercakupan)</li> <li>• Biaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan terhadap pemerintah</li> <li>• Partisipasi masyarakat</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kompetensi TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Online service</li> <li>• Integrasi</li> <li>• Willingness (Political will)</li> <li>• Kebijakan anggaran</li> <li>• Kebijakan program</li> <li>• Instrumen hukum</li> </ul>

Instrumen survey merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Instrumen survey dalam penelitian ini berbentuk kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang telah tersedia dalam *tool* yang ada berdasarkan kerangka pengukuran *e-readiness* yang telah ditetapkan.

Ada dua jenis kuesioner berdasarkan sifatnya [12], yaitu; 1). Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghadaki responden untuk memberikan jawaban atau respon dengan bebas, 2). Pertanyaan tertutup mengarahkan respon untuk memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan tertutup dalam penelitian ini disajikan dalam skala interval dengan tiga bentuk pilihan (opsi), yaitu;

Pilihan lima opsi, digunakan untuk mengindikasikan keadaan tertentu melalui pernyataan “sangat rendah”, “rendah”, “sedang”, “tinggi” dan “sangat tinggi”. Masing-masing pernyataan dalam opsi ini memiliki nilai (skor) interval sebanyak 20%. Contoh, dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai kualitas kecepatan akses internet (*bandwidth*), maka responden akan memilih salah satu dari lima opsi jawaban yang ada.

Pilihan tiga opsi, digunakan untuk mengindikasikan keadaan tertentu melalui tiga pernyataan. Sebagai contoh, untuk menilai seperti apa integrasi pengelolaan sumber daya jaringan di sebuah dinas atau instansi, maka responden diberikan tiga opsi pernyataan berupa; “terpisah”, “terpisah sebagian” dan “terintegrasi sepenuhnya”.

Pemberian nilai untuk masing-masing pernyataan tersebut adalah; opsi “terpisah” bernilai nol, “terpisah sebagian” bernilai 40, dan “terintegrasi sepenuhnya” bernilai 100.

Pilihan 2 opsi “ya” dan “tidak”. Opsi ini digunakan untuk memberikan jawaban yang bersifat tegas sehingga tidak ada pernyataan yang akan bernilai netral. Sebagai contoh, dalam menilai apakah instansi terkait telah menerapkan kaidah penamaan domain pemerintah berdasarkan Permen Kominfo 5/2015, maka responden cukup memberikan pernyataan “ya” atau “tidak”. Karena tidak memungkinkan adanya pernyataan netral, maka nilai untuk masing-masing pernyataan adalah 0 untuk opsi “tidak” dan 100 untuk opsi ya.

Analisa data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah atau menganalisis data [86]. Oleh sebab itu, setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan atas data yang telah dikumpulkan tersebut agar dapat menjadi informasi yang baik untuk dianalisa

Pengolahan data ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Setiap data yang ada akan dikonversi kedalam standar penghitungan melalui mekanisme pembobotan. Setelah diperoleh skor individu untuk masing-masing indikator diperoleh akan diberikan bobot hitung untuk mendapatkan skor pada aspek pengukuran diatasnya, seterusnya hingga ke tingkatan analisa kesiapan berdasarkan faktor. Untuk maksud tersebut, berikut daftar bobot tertimbang pada masing-masing aspek *e-readiness* dari ketiga faktor yang ada.

Tabel 3. Tabel Pembobotan Faktor dan Indikator E-Readiness

FAKTOR	BOBOT	
NILAI E-READINESS		
<b>Faktor Teknologi</b>		30.0%
Ketersediaan (Availability)	25.0%	7.5%
Kehandalan (Reliability)	25.0%	7.5%
Biaya	25.0%	7.5%
Penetrasi	25.0%	7.5%
<b>Faktor Manusia</b>		30.0%
Pendidikan (Education)	25.0%	7.50%
Keterampilan (Skill)	25.0%	7.50%
Pengembangan Kompetensi	25.0%	7.50%
Kesadaran dan Partisipasi masyarakat	25.0%	7.50%
<b>Faktor Institusional</b>		40.0%
Online Service	20.0%	8.00%
Integrasi (Integration)	20.0%	8.00%
Kemauan (Political Will)	20.0%	8.00%
Kebijakan Anggaran (Funding)	15.0%	6.00%
Kebijakan Program (Policy)	15.0%	6.00%
Kerangka Hukum (Legal Framework)	10.0%	4.00%

**HASIL**

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan terhadap tiga komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu kelompok pemerintah (*government*), kelompok masyarakat (*citizen*) dan kelompok bisnis (*business*).

**Kelompok Pemerintah**

Responden untuk kelompok pemerintah ini dikelompokkan lagi atas tiga sub kelompok lagi, yaitu; 1). Pemerintah di tingkat kota dan kabupaten; Kelompok responden ini dibatasi pada instansi pelaksana tupoksi komunikasi dan informasi di masing-masing lingkungan kerja kota dan kabupaten terkait. 2). Pemerintah Provinsi Gorontalo; Kelompok responden ini terdiri atas enam instansi dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, masing-masing adalah 1). Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (DKIS), 2). Dinas Keuangan Daerah (DKD), 3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 4). Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (BP2E), Dinas Energi, Sumber daya Mineral dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (ESDM & PTSP), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Penetapan responden untuk kelompok pemerintah di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini dilakukan dibatasi pada enam instansi tersebut karena keterlibatannya yang signifikan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Hal ini dilakukan terhadap sejumlah PNS yang ada pada enam instansi tersebut

diatas dengan maksud untuk mengukur faktor manusia (*human factors*) dari sisi pemerintah. PNS yang diambil datanya dalam hal ini bukan mereka yang terlibat secara managerial atau spesialis yang diwawancarai terkait hal-hal yang lebih mendalam di tataran managerial. Jumlah responden untuk kelompok pegawai ini ditetapkan sebanyak 5 orang untuk setiap instansi.

**Komunitas Bisnis**

Kelompok responden dalam hal ini dibatasi pada perusahaan atau kelompok usaha penyedia layanan internet dan jaringan telekomunikasi. Kelompok ini terdiri dari perusahaan penyelenggara layanan internet (ISP), perusahaan penyelenggara jaringan telepon seluler, maupun komunitas penyedia layanan internet melalui café dan warung-warung internet yang ada di Provinsi Gorontalo.

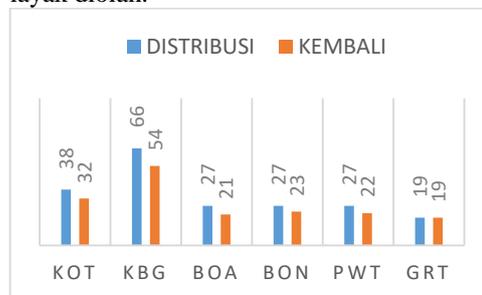
**Masyarakat**

Responden dari kelompok masyarakat ini merupakan agregat dari masyarakat di enam kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Penentuan responden ini ditetapkan berdasarkan kelompok umur 16 hingga 54 tahun.

Tabel 4. Aplikasi Rumus Slovin

<b>N</b>	<b>688,876</b>
<b>E</b>	<b>7%</b>
<b>e<sup>2</sup></b>	<b>0.0049</b>
<b>N*e<sup>2</sup></b>	<b>3,375.49</b>
<b>1+N*e<sup>2</sup></b>	<b>3,376.49</b>
<b>N/(1+N*e<sup>2</sup>)</b>	<b>204</b>
<b>proporsi</b>	<b>0.0296%</b>

Dari 204 kuesionner yang diharapkan tersebut, tidak semuanya dikembalikan dan layak diolah.



Gambar 2. Grafik Perolehan Kuesionner

Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini dapat berupa data kuantitatif

dan data kualitatif. Data ini diperoleh dari sumber yang bermacam-macam sehingga perlu ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian distandarisasi dengan mekanisme pembobotan seperti yang telah dikemukakan di atas. Mekanisme pembobotan ini dilakukan sedemikian rupa agar data yang berbeda jenis dapat diolah bersama-sama, dan selanjutnya akan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat yang akan menjadi hasil atau temuan atas penelitian ini.

Pengukuran *e-readiness* dengan pendekatan sosio teknis ini mengukur berapa aspek yang berhubungan dengan kondisi sosial di institusi tertentu dan masyarakatnya. Oleh sebab itu beberapa data sekunder menyangkut hal itu diperlukan untuk dianalisis. Data-data sekunder tersebut sedapat mungkin diperoleh dari berbagai sumber resmi untuk menjamin keabsahannya.

### Hasil Pengolahan Data Sekunder

Penilaian terhadap PNS dan masyarakat umum berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir ini merupakan salah satu dari beberapa indikator lainnya yang turut dinilai dalam aspek pendidikan. Khususnya PNS, beberapa indikator lainnya berupa pendidikan yang sifatnya struktural maupun fungsional di instansi tertentu juga turut diukur secara implisit dalam hasil tabulasi data yang diperoleh dari jawaban responden. Data PNS berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir diperoleh dari instansi kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten terkait, sedangkan data PNS berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki diperoleh dari data sensus yang dipublikasikan oleh BPS di wilayahnya masing-masing.

Tabel 5. Indikator Penilaian PNS Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

KOTA/KAB	JLH PEG (Orang)	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	D1-3 (%)	D4 & S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)	NILAI
<b>BOBOT</b>					<b>25%</b>	<b>60%</b>	<b>10%</b>	<b>0.20%</b>	<b>95.20%</b>
KOT	5,753	0.92	0.83	31.01	21.83	41.21	4.19	-	49.48
KBG	6,316	0.54	0.71	20.38	14.90	56.02	7.25	0.21	82.10
BOA	3,667	0.65	0.85	25.55	14.15	55.96	2.84	-	44.56
BON	4,133	0.44	0.65	27.37	23.13	47.40	1.02	-	45.42
PWT	3,999	0.28	0.73	25.01	16.53	55.59	1.88	-	44.38
GRT	2,688	0.07	0.33	12.80	19.98	61.61	5.13	0.07	67.78
PROV	3,131	0.70	0.86	23.86	11.75	51.29	11.24	0.29	97.16

Tabel 6. Indikator Penilaian Masyarakat Berdasarkan Ijazah Terakhir

KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	NIHIL (%)	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PT (%)	NILAI
<b>BOBOT (%)</b>					<b>40.00</b>	<b>20.00</b>	
KOT	202,202	19.25	19.48	17.94	29.19	14.14	71.84
KBG	370,441	42.36	26.54	13.28	12.75	5.07	28.61
BOA	149,832	47.97	25.95	11.55	9.59	4.94	24.34
BON	153,166	30.92	30.71	14.54	17.31	6.52	37.94
PWT	146,896	37.15	29.83	15.52	11.81	5.69	28.99
GRT	110,700	40.16	33.53	13.13	9.13	4.05	21.54
PROV	1,133,237						

Tabel 7. Hasil Penilaian Aksesibilitas Terhadap Perguruan Tinggi

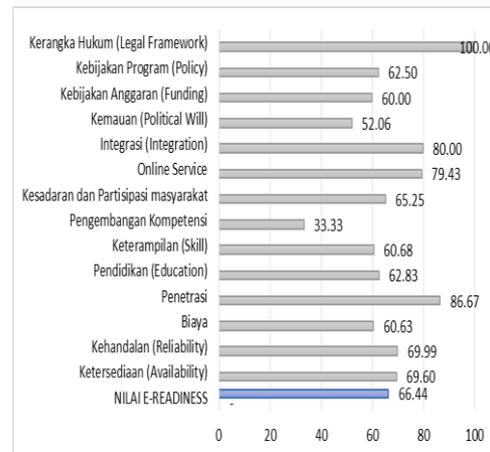
NAMA PERGURUAN TINGGI	LOKASI	KOT	KBG	BOA	BON	PWT	GRT	
	JARAK (KM)	0	16	105	14	158	57	
Universitas Negeri Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
Universitas Gorontalo	KBG	16	5	0	3	5	1	5
Universitas Ichsan Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
Universitas Muhammadiyah Gorontalo	KBG	16	5	5	3	5	1	5
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna	KOT	0	5	5	3	5	1	4
STITEK Bina Taruna	KOT	0	5	5	3	5	1	4
STMIK Ichsan	KOT	0	5	5	3	5	1	4
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan	KOT	0	5	5	3	5	1	4
STMIK Boalemo	BOA	105	5	3	5	3	4	4
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Bisnis Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
STIM Boalemo	BOA	105	5	3	5	3	4	4
STIKES Bina Mandiri Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
STIKES Bakti Nusantara Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
Akademi Komputer Mall Cendikia	KOT	0	5	5	3	5	1	4
Politeknik Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
IAIN Sultan Amai Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
Poltekkes Kemenkes Gorontalo	KOT	0	5	5	3	5	1	4
<b>SKOR</b>		<b>85</b>	<b>76</b>	<b>55</b>	<b>81</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	
<b>NILAI</b>		<b>100.00</b>	<b>89.41</b>	<b>64.71</b>	<b>95.29</b>	<b>27.06</b>	<b>82.35</b>	

**Hasil Pengukuran E-Readiness**

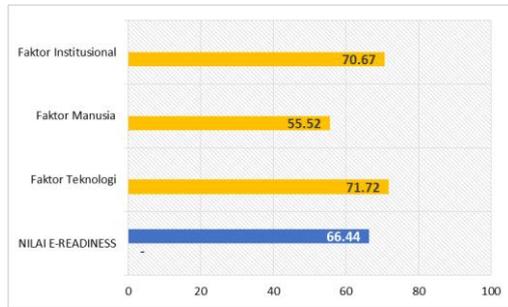
Pengukuran *e-readiness* di wilayah Pemerintah Kota dan Kabupaten dilakukan terhadap tiga komponen utama *e-government*. Ketiga komponen tersebut adalah; 1). Komponen pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Gorontalo, 2). Komponen masyarakat dengan sejumlah responden yang telah dihitung sebelumnya, 3). Komponen bisnis yang dalam penelitian ini dibatasi pada komunitas bisnis penyelenggara jasa internet (ISP) dan operator seluler.

Adapun hasil pengukuran untuk masing-masing kota dan kota dan kabupaten ditunjukkan sebagai berikut;

**A. Kota Gorontalo**



Gambar 3. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek

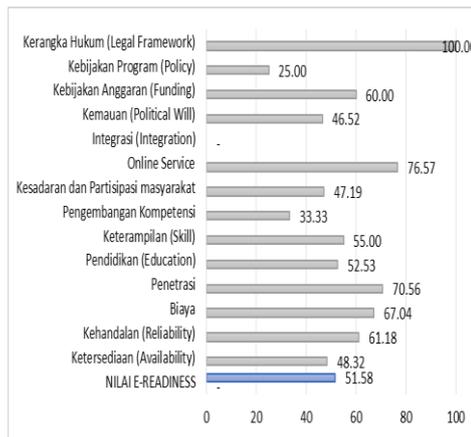


Gambar 4. Nilai E-Readiness Berdasarkan Faktor

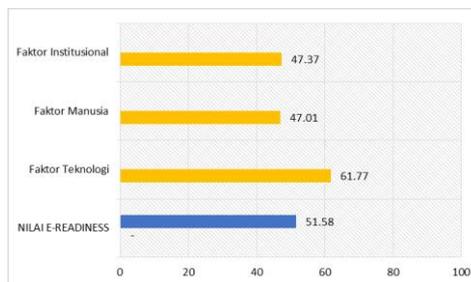
Tabel 8. Peringkat E-Readiness Kota Gorontalo

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
PEMERINTAH	62.99	B	TINGGI
MASYARAKAT	65.84	B	TINGGI
BISNIS	77.97	B	TINGGI
NILAI E-READINESS	66.04	B	TINGGI

**B. Kabupaten Gorontalo**



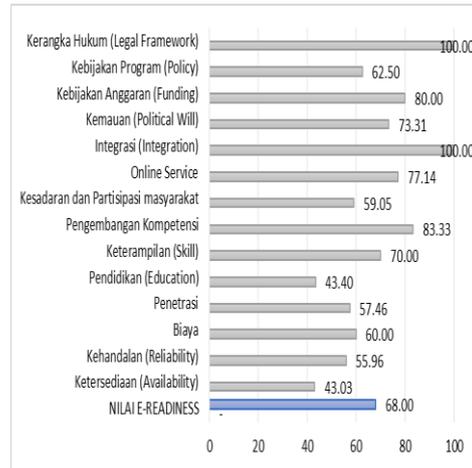
Gambar 5. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek



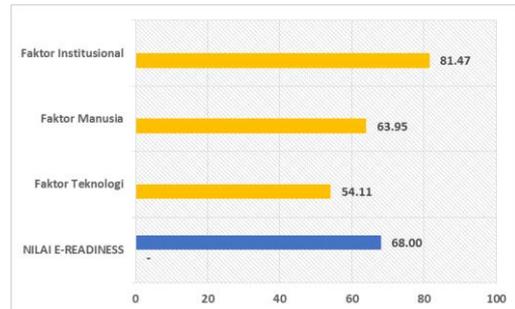
Tabel 9. Peringkat E-Readiness Kab. Gorontalo

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
PEMERINTAH	43.67	C	SEDANG
MASYARAKAT	53.43	C	SEDANG
BISNIS	65.43	B	TINGGI
NILAI E-READINESS	51.58	C	SEDANG

**C. Kabupaten Boalemo**



Gambar 6. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek

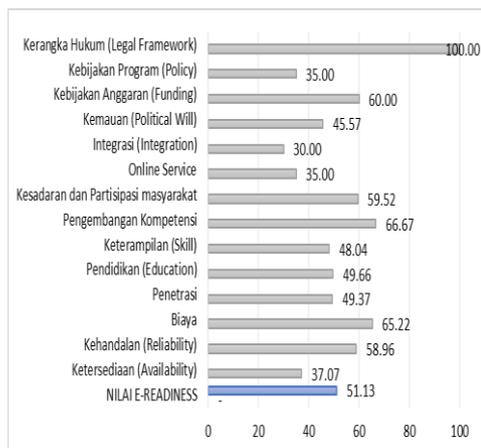


Gambar 7. Nilai E-Readiness Berdasarkan Faktor

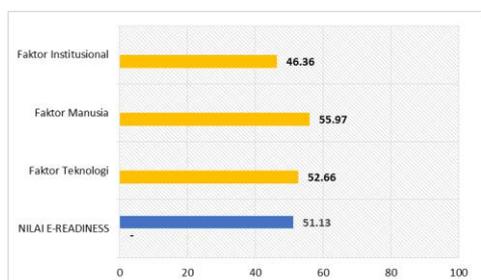
Tabel 10. Peringkat E-Readiness Kab. Boalemo

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
PEMERINTAH	82.33	A	SANGAT TINGGI
MASYARAKAT	53.02	C	SEDANG
BISNIS	45.25	C	SEDANG
NILAI E-READINESS	68.00	B	TINGGI

**D. Kabupaten Bone Bolango**



Gambar 8. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek

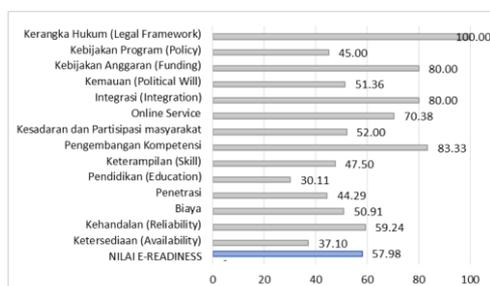


Gambar 9. Nilai E-Readiness Berdasarkan Faktor

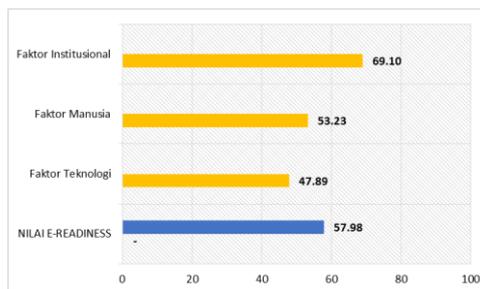
Tabel 11. Peringkat E-Readiness Kab. Bone Bolango

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
<b>PEMERINTAH</b>	48.12	C	SEDANG
<b>MASYARAKAT</b>	48.17	C	SEDANG
<b>BISNIS</b>	51.45	C	SEDANG
<b>NILAI E-READINESS</b>	51.13	C	SEDANG

**E. Kabupaten Pohuwato**



Gambar 10. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek

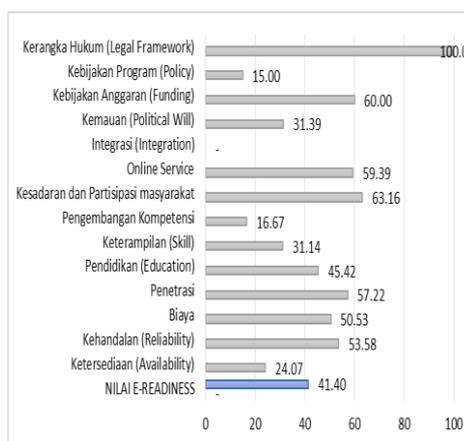


Gambar 11. Nilai E-Readiness Berdasarkan Faktor

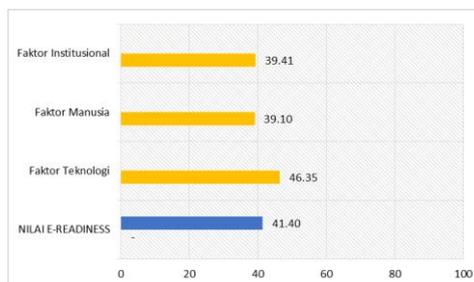
Tabel 12. Peringkat E-Readiness Kab. Pohuwato

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
<b>PEMERINTAH</b>	63.81	B	TINGGI
<b>MASYARAKAT</b>	41.58	C	SEDANG
<b>BISNIS</b>	44.57	C	SEDANG
<b>NILAI E-READINESS</b>	57.98	C	SEDANG

**F. Kabupaten Gorontalo Utara**



Gambar 12. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek

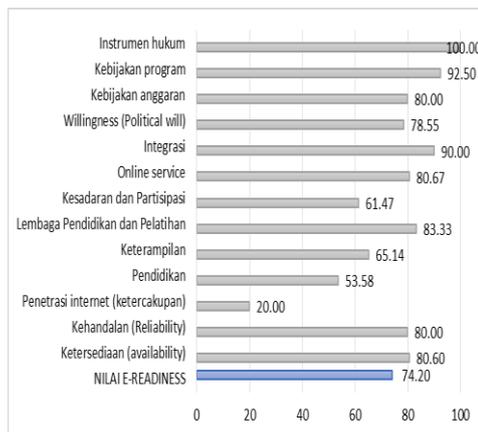


Gambar 13. Nilai E-Readiness Berdasarkan Faktor

Tabel 13. Peringkat E-Readiness Kab. Gorut

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
PEMERINTAH	31.34	D	RENDAH
MASYARAKAT	44.63	C	SEDANG
BISNIS	47.82	C	SEDANG
NILAI E-READINESS	41.40	C	SEDANG

G. Pemerintah Provinsi Gorontalo



Gambar 14. Nilai E-Readiness Berdasarkan Aspek

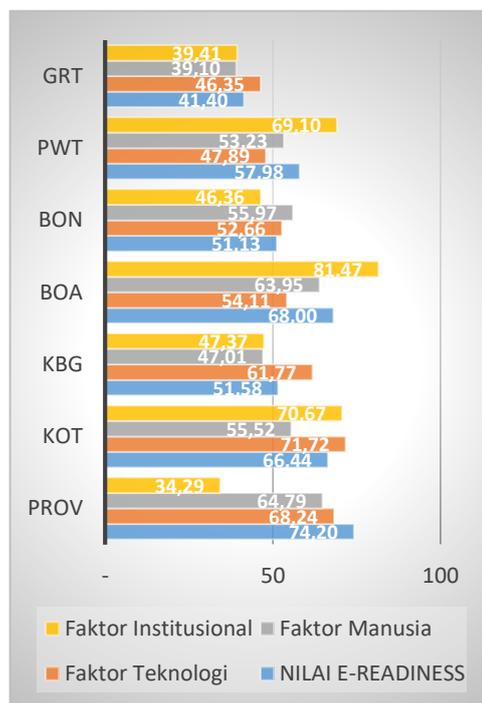


Gambar 15. Nilai E-Readiness Lingkungan Pemprov Gorontalo

Tabel 14. Peringkat E-Readiness Lingkungan Pemprov Gorontalo

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
DKIS	68.78	B	TINGGI
BAPPEDA	83.62	A	SANGAT TINGGI
BP2E	87.50	A	SANGAT TINGGI
PTSP	61.04	B	TINGGI
ULP	85.67	A	SANGAT TINGGI
BKD	88.77	A	SANGAT TINGGI
ASN	66.77	B	TINGGI
PEMPROV	74.20	B	TINGGI

H. Rekapitulasi



Gambar 16. Rekapitulasi E-Readiness Provinsi Gorontalo

Tabel 15. Peringkat E-Readiness Berdasarkan Provinsi, Kota dan Kabupaten

	NILAI E-READINESS	GRADE	INTERPRETASI
PROV	74.20	B	TINGGI
KOT	66.44	B	TINGGI
KBG	51.58	C	SEDANG
BOA	68.00	B	TINGGI
BON	51.13	C	SEDANG
PWT	57.98	C	SEDANG
GRT	41.40	C	SEDANG
RATA-RATA	58.68	C	SEDANG

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh selama pengukuran e-readiness di Provinsi Gorontalo ini, secara umum terdapat beberapa hal krusial yang dapat direkomendasikan dalam pencapaian tingkat kesiapan komponen-komponen e-government terkait, baik itu menyangkut faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional.

Faktor Teknologi

Pereira [1] mengisyaratkan bahwa hal terpenting dalam mewujudkan kesiapan organisasi dalam e-governance adalah integrasi. Berkenaan dengan temuan-temuan dalam penelitian ini, pemerintah harus mengupayakan integrasi infrastruktur TIK baik secara horizontal maupun vertikal. Pemerintah beserta seluruh jajaran

instansinya harus terintegrasi seutuhnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum berjalan efektif dan efisien. Pemerintah bukan hanya saling terhubung satu sama lain, tapi terkolaborasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, menyajikan layanan bagi masyarakat secara transparan dan akuntabel.

### Faktor Manusia

Sebagaimana dikemukakan oleh Sam Musa [9] dan Anthopoulos [34] bahwa “roh” *smart government* terletak pada bagaimana warga menjadi salah satu komponen partisipatif yang secara konkrit menggerakkan kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, bahkan kegiatan politik. Hal ini hanya akan terwujud dengan baik jika warga memiliki kepedulian (*awareness*) yang memadai terkait isu-isu tersebut.

Dalam kaitannya dengan hasil temuan dalam penelitian ini, disamping adanya kesenjangan digital yang cukup lebar antara mereka yang tinggal di perkotaan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan, terdapat faktor manusia yang sangat mendasar mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pemanfaatan TIK. Kurangnya akses terhadap informasi yang bersifat konstruktif menjadi faktor utama rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan *e-government*. Dalam hal ini pemerintah sangat perlu mengambil langkah-langkah strategis bagi peningkatan persepsi masyarakat melalui penyebaran informasi dan sosialisasi pemanfaatan TIK dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manfaat manfaat yang ditawarkan melalui pemanfaatan TIK dan aplikasi-aplikasi *e-government* yang ada.

### Faktor Institusional

Beberapa temuan dalam domain institusi yang dalam hal ini instansi komunikasi dan informasi di wilayah kabupaten dan kota seprovinsi Gorontalo, menunjukkan adanya beberapa persepsi negatif mengenai upaya dan kemauan pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakatnya. Beberapa responden menilai pemerintah terkait kurang responsif menanggapi permintaan informasi maupun keluhan yang disampaikan.

Dampak yang timbul dari tingkat responsif pemerintah yang tinggi ialah masyarakat merasa suara mereka didengar

dan dipedulikan, terlebih lagi ketika keluhan tersebut diselesaikan secara baik. Sebagaimana disimpulkan dalam Fard & Rostamy [100] dalam sebuah risetnya bahwa kinerja pemerintah yang baik akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya.

Terkait dengan hasil temuan dalam penelitian ini, maka yang dapat disarankan untuk peningkatan kinerja pemerintah agar persepsi masyarakat tersebut membaik adalah; pemerintah terkait perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi-instansi dilingkungan kerjanya masing-masing. Evaluasi juga dilakukan terhadap tata kelola dan prosedur layanan. Hal ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang timbul dari proses birokrasi yang tidak perlu.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran *e-readiness* menggunakan tool ini dapat dilihat bahwa *e-readiness* Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 74.20. ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup siap secara sosial dan teknis dalam mengimplementasikan *smart government*.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Kende, “Global Internet Report 2016,” 2016.
- [2] J. K. Scott, “Assessing the quality of web sites,” *State Local Gov. Rev.*, vol. 37, pp. 151–165, 2005.
- [3] R. Heeks, “Most E-Government for Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?,” 2003.
- [4] R. E. Indrajit, “Penilaian Profil Penerapan dan Pengembangan E-Government.” EKOJI999, Jakarta, 2012.
- [5] W. Kumorotomo, “Kegagalan Penerapan E-Government Dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet,” pp. 2–10, 2010.
- [6] The World Bank, “e-Government,” 2015. [Online]. Available: <http://beta.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government>. [Accessed: 17-Jan-2017].
- [7] M. R. Musa, “An e-readiness Assessment Tool for Local Authorities: A Pilot

- Application to Iraq,” American University in Cairo, 2010.
- [8] F. Nento, L. E. Nugroho, and Selo, “Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government: Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo,” in *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri (SENIATI)*, 2017, p. B27.1-6.
- [9] T. Nam and T. a. Pardo, “Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions,” *Proc. 12th Annu. Int. Digit. Gov. Res. Conf. Digit. Gov. Innov. Challenging Times - dg.o '11*, p. 282, 2011.
- [10] B. Cohen, “What Exactly is a Smart City?,” 2013. [Online]. Available: [m/1680538/what-exactly-is-a-smart-city](http://m/1680538/what-exactly-is-a-smart-city)).
- [11] B. Cohen, “Smart City Index Master Indicators.” Universidad del Desarrollo Esade Institute For Public Governance And Management, 2014.
- [12] J. W. J. W. Creswell, V. L. P. Clark, and V. L. Plano Clark, “Designing and Conducting Mixed Methods Research,” p. 275, 2007.